

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Arkeologi Maritim baru mulai muncul sekitar tahun 1970an. Definisi tentang Arkeologi maritim yang diuraikan oleh Keith Muckelroy adalah suatu studi tentang tinggalan benda budaya dari manusia dan segala aktivitas terkait kelautan (1978:4). Definisi serupa dikemukakan juga oleh Edi Sedyawati, yang menyebut kajian maritim meliputi hubungan antara manusia dan laut. Dalam konteks kajian maritim yang bersifat sosial–budaya, subyek penelitiannya adalah mengenai segala pemikiran, pandangan, perilaku manusia, beserta segala benda budaya yang terkait dengan kehidupan manusia dalam kaitannya dengan laut (2005:1-2).

Perhatian pokok arahan pengembangan Arkeologi Maritim menurut Edi Sedyawati (2006:30) diarahkan pada dua garapan, yang *pertama*, mempelajari dan menangani segala tinggalan dibawah air, dan *kedua*, mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan kelautan dan pelayaran, namun datanya terdapat didarat. Maka pokok bahasan arkeologi maritim bisa mengenai aspek-aspek bahasan dan tinggalan-tinggalan baik yang berada didalam air dan yang berada di darat.

Dalam kajian arkeologi maritim, studi pembahasannya meliputi benda–benda peninggalan maritim, yaitu: hasil studi ekskavasi perahu dan kapal, termasuk di dalamnya kapal karam (*shipwrecks*) dan muatannya, sisa–sisa kapal, pembuatan pelabuhan, kota pelabuhan, pelabuhan ikan, kanal–kanal, jembatan dan masyarakat nelayan yang memberikan informasi berharga dalam sejarah pelayaran, perikanan, perdagangan, peperangan di laut dan teknologi maritim (Ellis, 2009:390).

Dari luasnya pembahasan masalah dalam arkeologi maritim, pemilihan studi tematik tertentu mengenai kelautan sangat mungkin bisa dikaji dan dikembangkan oleh peneliti. Kajian tentang maritim Nusantara sudah diawali oleh beberapa ahli sejarah, misalnya; Robert Dick-Read, (1960) Pengaruh Peradaban Nusantara Di Afrika Penjelajah Bahari; Horst H. Liebner Perahu Perahu Tradisional Nusantara; Suatu Kajian Sejarah Perkapalan dan Pelayaran; AB Lopian (1992) Sejarah Nusantara Sejarah Bahari.

Pesatnya perkembangan aktivitas perdagangan dan pelayaran di Nusantara, menjadikan Nusantara tempat yang sering disinggahi dan bahkan menjadi tujuan utama pelayaran internasional di masa lalu. Misalnya Pantai Utara Jawa memang sebelumnya telah menjadi daerah strategis pada masa-masa kerajaan Mataram, Hindu, Majapahit, Demak, Pajang, karena menjadi simpul perekonomian kawasan Pulau Jawa. Lalu lintas perdagangan antar bangsa melalui laut Nusantara juga menyinggahi daerah lain seperti pesisir utara Kepulauan Sunda kecil dan akhirnya sampai di Maluku. Kemudian pada

kurun abad ke 16-17 M pula, dikenal sebagai masa-masa kejayaan dari berbagai kerajaan-kerajaan Islam yang bercorak maritim di Nusantara. Mulai dari Kerajaan Aceh masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang berada di Sumatera, Kerajaan Banten masa Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1682) dan Mataram Islam masa Sultan Agung (1613-1645) di Jawa, Makassar di Sulawesi, Kerajaan Ternate masa Sultan Khairun (1535), Tidore di kepulauan Maluku, dan Kerajaan Bima di Kawasan Nusa Tenggara.

Letak Nusa Tenggara sangat strategis dalam jaringan perdagangan rempah di bagian selatan Nusantara. Kawasan yang disebut dengan Nusa Tenggara ini terbentang dari Pulau Bali hingga Pulau Timor. Kawasan ini menjadi tempat strategis untuk pemberhentian kapal atau perahu untuk singgah, memenuhi perbekalan, mengisi air, dan beristirahat. Pantai Utara Nusa Tenggara sejak dahulu merupakan sumber pendapatan yang penting bagi masyarakat pelabuhan dan kerajaan pesisir. Atas dasar itulah, kemudian mulai abad ke-16 dan ke-17 di daerah pesisir utara Nusa Tenggara banyak tumbuh kota-kota pelabuhan yang berkembang pesat salah satunya yakni Kota Kesultanan Bima.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Perdana (2024), Susetyo (2013, 2014), Reid (2011), Bintarti (2008), Lopian (2008), Ismail (2004), Maryam (2004), Burhanuddin (2003), Kempers (1988), Geldern (1945), Suantika (1989), Soekarno (1990), Samidi (1988), Tajib (1995), maka diketahui bahwa Aktivitas kemaritiman yang ditandai dengan kegiatan pelayaran dan perdagangan di Bima dibagi menjadi tiga periode yakni: Periode awal yaitu meliputi kurun waktu paleometalik diperkirakan dari 250 SM- 3 M, Periode kedua yaitu meliputi kurun waktu Abad ke XI-XV M, Periode ketiga yaitu meliputi kurun waktu Abad ke XVI-XX M.

Periode pertama yaitu bukti aktivitas pelayaran dan perdagangan di Bima telah berlangsung sejak masa Paleometalik, seperti yang ditunjukkan oleh persebaran nekara perunggu. Nekara ini, yang pertama kali ditemukan di Dong Son, Vietnam, menyebar hingga ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Pulau Sangeang di sekitar Bima, Nusa Tenggara Barat. Di Sangeang, ditemukan tujuh nekara yang kini tersimpan di Museum Nasional, Jakarta. Penduduk lokal menyebutnya Makalamau, Waisarinci, atau Saritasangi. Nekara perunggu tidak hanya menjadi simbol budaya tetapi juga bagian dari perdagangan jarak jauh, mengindikasikan bahwa wilayah Bima sudah terhubung dengan jaringan maritim Asia Tenggara sejak periode ini.

Pada periode berikutnya pada masa kejayaan Hindu-Buddha di Nusantara, Bima mulai muncul dalam catatan sejarah Kerajaan Jawa Kuno, seperti yang tercantum dalam kitab Nagarakertagama karya Empu Prapanca tahun 1365. Wilayah Bima, termasuk Sangeang, disebut sebagai bagian dari Majapahit yang memiliki pelabuhan strategis. Interaksi antara Jawa dan Bima bahkan dimulai sejak masa Kerajaan Kahuripan pada abad ke-11, ketika Raja

Erlangga memerintah. Pada masa ini, kuda Bima menjadi komoditas utama yang didistribusikan ke kerajaan-kerajaan di Jawa, seperti Singasari dan Kediri. Situs Wadu Pa'a di Teluk Bima menjadi bukti pengaruh Hindu-Buddha di wilayah ini. Relief Agastya, Ganesha, dan Buddha yang ditemukan di sana menunjukkan adanya kontak dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Lokasinya yang strategis sebagai tempat persinggahan memperkuat peran Bima dalam pelayaran jarak jauh pada masa itu. Temuan-temuan yang membuktikan hal ini seperti Situs Wadu Pa'a, Situs Tembe, dan Situs Wadu Tunti yang merupakan bukti pengaruh Hindu-Budha di Bima (Samidi, 1988: 13).

Memasuki periode ketiga pada abad ke-16 hingga ke-17 M, Bima mengalami masa transisi dari kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha menjadi Kesultanan Islam. Bima berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan Islam di Nusa Tenggara dan menjadi salah satu pelabuhan penting dalam jaringan perdagangan Malaka-Maluku. Pelabuhan-pelabuhan seperti Bima, Sape, Sanggar, dan Calabai menjadi pendukung utama kegiatan pelayaran dan perdagangan pada abad ke-16 hingga ke-17 M. Jalur perdagangan ini berperan penting dalam penyebaran Islam, dengan kedatangan para mubalig dari Melayu, Aceh, Jawa, dan Sulawesi Selatan. Proses islamisasi ini diperkaya oleh kehadiran para pedagang muslim yang bermukim di wilayah Bima. Bukti arkeologi ini menunjukkan bahwa Bima tidak hanya menjadi persinggahan tetapi juga pusat aktivitas ekonomi politik dan keagamaan. Hubungan historis dengan kerajaan-kerajaan Islam di Makassar seperti Kesultanan Gowa membawa pengaruhnya ke wilayah timur melalui kegiatan perdagangan. Kemudian, hubungan ini berlanjut pada zaman kolonial Belanda dengan VOC ingin menguasai hegemoni perdagangan wilayah ini, yaitu mengeksploitasi hasil bumi dan produksi kerajinan rakyat sebanyak-banyaknya. Ekspansi Gowa dan Belanda ke wilayah Bima menjadi salah satu faktor yang memperkuat peran maritim Bima dalam jaringan perdagangan Nusantara.

Dalam konteks sejarah maritim Nusantara, Bima merupakan salah satu kota penting yang sering luput dari perhatian penelitian. Aktivitas pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Bima menunjukkan keterhubungan wilayah ini dengan pusat-pusat kekuasaan besar seperti Jawa, Maluku, Makassar. Periode keemasan pelayaran dan perdagangan di Kawasan Indonesia Timur pada abad ke-16 hingga ke-17, Bima menjadi salah satu pelabuhan penting di Nusa Tenggara, membuka peluang untuk penelitian arkeologi maritim yang lebih mendalam. Penelitian ini penting untuk memahami jaringan perdagangan maritim Nusantara dan kontribusi wilayah-wilayah kecil seperti Bima dalam membentuk dinamika ekonomi dan budaya yang lebih luas.

Penelitian ini mencoba memaparkan karakteristik Bima sebagai kota maritim melalui bukti arkeologis berupa komponen-komponen kota tua Bima didukung oleh kondisi lanskap Bima yang ideal sebagai kota pelabuhan serta

peran Bima dalam konteks pelayaran dan perdagangan pada abad ke-16 hingga ke-17 M di Nusantara.

Dalam periode ini, Bima berada di jalur perdagangan penting yang menghubungkan berbagai wilayah di Nusantara serta jalur perdagangan internasional. Peran Bima sebagai salah satu pelabuhan transit dan pusat perdagangan yang menghubungkan Maluku, Jawa, dan bahkan kawasan luar Nusantara masih relatif kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan dalam kajian arkeologi maritim Nusantara dengan menyoroti kota pelabuhan kecil yang perannya sering kali terabaikan dalam narasi besar jalur rempah Nusantara.

Dengan memahami dinamika Bima sebagai kota maritim pada abad ke-16 hingga ke-17 M, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana Bima terintegrasi dan berkembang melalui jalur perdagangan maritim. Penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan timbal balik antar komponen-komponen kota dan lanskap alam yang mendukung terbentuknya Bima sebagai kota maritim abad ke-16 hingga ke-17 M.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagai wilayah yang terletak di jalur strategis antara Jawa, Maluku, dan Makassar, Bima menjadi titik persinggahan kapal-kapal dagang yang membawa berbagai komoditas. Selain itu, keberadaan sumber daya lokal seperti kuda, budak, kayu sapan, menjadikan Bima tidak hanya sebagai pelabuhan transit tetapi juga sebagai penghasil komoditas yang diminati di pasar regional maupun internasional.

Kondisi alam Bima berbeda dengan daerah lainya dipahami seutuhnya sebagai sebuah faktor yang membentuk pola perdagangan dan pelayaran antar pulau sehingga membentuk sebuah kota maritim yang terorganisir. Bima menawarkan pelabuhan yang aman dari amukan gelombang karena berada dalam teluk. Sebagai wilayah yang mengambil peran penting dalam pelayaran dan perdagangan antar pulau, Bima di dukung oleh kondisi alamnya yang memungkinkan menjadikannya sebagai daerah yang banyak di singgahi dan berkembang menjadi salah satu kota maritim di Nusa Tenggara.

Namun, meskipun peran strategis Bima dalam sejarah maritim telah banyak dibahas, namun penelitian yang membahas terkait rekonstruksi jalur pelayaran, dan karakteristik komponen-komponen Kota Bima, dan lanskap maritim di Bima melalui pendekatan arkeologis tersebut masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah berikut:

1. Apa saja bukti Arkeologi Kota Tua Bima Abad ke- 16 - 17 M?
2. Bagaimana Karakteristik Bima sebagai kota maritim pada abad ke- 16 - 17 M?
3. Bagaimana peran Bima dalam jalur pelayaran dan perdagangan Nusantara abad ke- 16 - 17 M?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian arkeologi dilakukan tidak terlepas dari tiga tujuan arkeologi. Ketiga pokok tujuan arkeologi yaitu rekonstruksi sejarah kebudayaan, menyusun kembali cara-cara hidup masyarakat masa lalu, serta memusatkan perhatian pada proses dan berusaha memahami proses perubahan budaya, sehingga dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa kebudayaan masa lalu mengalami perubahan bentuk, arah dan kecepatan perkembangannya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bukti Arkeologi Kota Tua Bima Abad ke- 16 - 17 M.
2. Mengetahui karakteristik Bima sebagai kota maritim abad ke- 16 - 17 M.
3. Mengetahui Peran Bima dalam Jaringan Pelayaran dan perdagangan di Nusantara Abad ke- 16 - 17 M.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam bidang keilmuan dan dapat juga memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah daerah dalam membuat kebijakan pembangunan dan pengembangan, serta dapat memberikan kontribusi terhadap proses pemahaman akan sejarah bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya masyarakat di Kota dan Kabupaten Bima. Adapun manfaat dari penelitian ini dalam bidang keilmuan khususnya arkeologi dan ilmu lainnya, yaitu:

1. Penelitian ini dapat menambah data arkeologi dan memperkuat sejarah yang pernah terjadi.
2. Dapat menyelamatkan data arkeologi khususnya jejak tinggalan Kerajaan Bima maupun budaya maritim di Kota dan Kabupaten Bima.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi arkeologi terapan seperti Cultural Resource Management (CRM) atau yang bertemakan pelestarian, dan bagi disiplin ilmu lain yang tertarik untuk mengkaji tentang budaya Kerajaan Bima.

Selain itu, manfaat lain dari penelitian ini bagi pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu:

1. Memberikan kontribusi berupa informasi data kepada masyarakat setempat, pemerintah, terutama pihak sebagai penentu kebijakan dalam bidang pelestarian situs-situs bersejarah. Hal ini diharapkan agar dapat mengambil langkah yang bersifat perawatan dan perlindungan pada daerah yang mengandung tinggalan bersejarah, yang bermanfaat untuk perlindungan data pada masa yang akan datang.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai sejarah dan diharapkan dapat menumbuhkan rasa simpati, empati, dan memperkuat jati

diri bangsa yang mengarah pada kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian situs bersejarah.

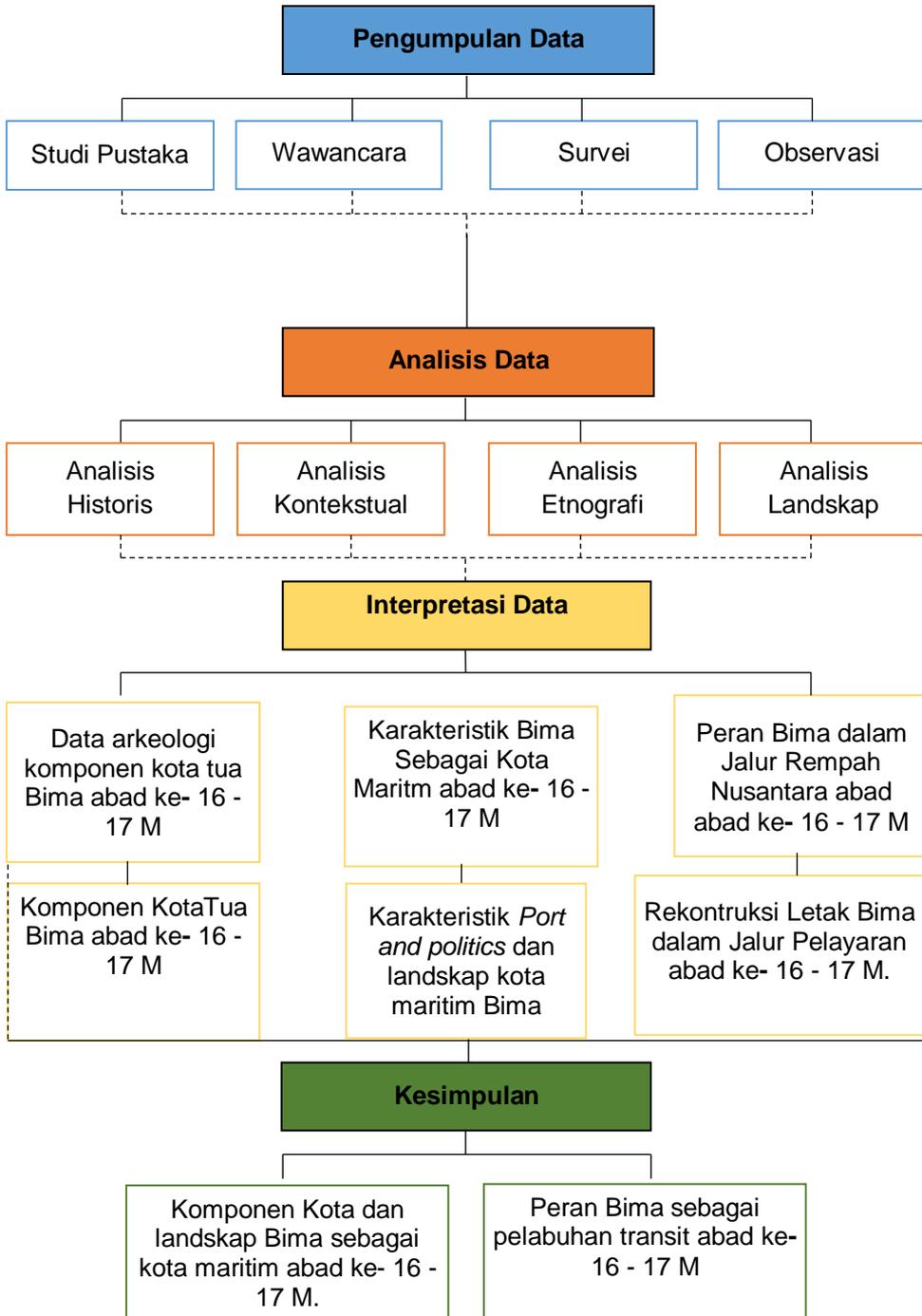
## **1.5 Bagan Pelaksanaan Penelitian**

Bagan penelitian yang ditampilkan menggambarkan proses sistematis dalam meneliti peran Bima dalam jalur rempah Nusantara pada abad ke-16 dan ke-17. Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui berbagai metode seperti studi pustaka, wawancara, survei, dan observasi. Sumber data ini memberikan landasan awal untuk memahami konteks sejarah dan sosial-ekonomi wilayah Bima pada masa tersebut.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan empat pendekatan utama: analisis historis, analisis kontekstual, analisis etnografi, dan analisis lanskap. Analisis historis membantu memahami peran Bima dalam lintasan sejarah, sementara analisis kontekstual dan etnografi berfokus pada aspek budaya dan sosial masyarakatnya. Analisis lanskap digunakan untuk mengeksplorasi kondisi geografis yang mendukung posisi strategis Bima dalam jaringan perdagangan maritim.

Interpretasi data menghasilkan tiga aspek penting. Pertama, posisi Bima dalam jalur rempah Nusantara abad ke-16 dan ke-17 M dijelaskan melalui jalur pelayaran yang melibatkan wilayah ini. Kedua, komponen pembentuk jaringan maritim diidentifikasi, termasuk aktor manusia (seperti pedagang dan penguasa lokal) serta aktor non-manusia (pelabuhan dan komoditas). Ketiga, interkoneksi antara komponen-komponen ini mengungkap bagaimana jaringan perdagangan tersebut beroperasi.

Kesimpulan penelitian merangkum dua temuan utama. Yang pertama adalah rekonstruksi jalur pelayaran abad ke-16 dan ke-17 M, yang menunjukkan peran Bima sebagai simpul penting dalam perdagangan rempah-rempah. Kedua adalah pemahaman tentang



**Gambar 1.** Bagan Pelaksanaan Penelitian  
(Sumber : Lila Jamilah , 2024)

## 1.6 Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibagi menjadi enam bab, Bab I memuat tentang penelitian tinggalan Arkeologi Maritim. Di Kabupaten Bima sendiri masih banyak terdapat situs-situs maritim. Dari kajian awal, diketahui bahwa Aktivitas kemaritiman yang ditandai dengan kegiatan pelayaran dan perdagangan di Bima dibagi menjadi tiga periode yakni: Periode awal yaitu meliputi kurun waktu paleometalik diperkirakan dari 250 SM- 3 M, Periode kedua yaitu meliputi kurun waktu Abad ke 11-15 M, Periode ketiga yaitu meliputi kurun waktu Abad ke 16-20 M. Jalur-jalur pelayaran yang telah dirintis kemudian semakin ramai, penelitian yang ada menunjukkan bahwa wilayah Bima sarat dengan tinggalan arkeologi maritim, dan salah satunya Teluk Bima menjadi pelabuhan yang penting pada periode ini ditandai dengan perkembangan Pelabuhan Bima, basis pertahanan Kota berupa benteng, maupun sistem tata kota yang semakin kompleks. Gambaran ini kemudian memberikan informasi yang cukup lengkap untuk melakukan penelitian terkait aktivitas maritim di Bima yang memiliki peran penting dalam jaringan pelayaran dan perdagangan di Nusantara.

**Bab II** berisi tentang riwayat penelitian berbagai penelitian yang pernah dilakukan terkait Kerajaan Bima. Pada bab ini juga dijabarkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini juga akan membahas tentang profil wilayah penelitian secara administrasi kabupaten dan Kota Bima, Topografi, keadaan iklim, keadaan sungai dan pesisir. Pada bab ini juga bersisi tentang pembahasan terkait latar belakang sejarah Kerajaan Bima, wilayah kekuasaan, sistem pemerintahan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat pada masa lalu.

**Bab III** berisi tentang lokasi dan metodologi dalam penelitian. Metode pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data pustaka dan pengumpulan data lapangan. Dilanjutkan dengan pengelolaan data yang terdiri dari analisis dan lanskap, historis, kontekstual, dan lanskap dan diakhiri dengan interpretasi data.

**Bab IV** berisi tentang data arkeologi yang terdiri dari Komponen-komponen Kota Bima seperti Beberapa titik penting komponen-komponen Kota Bima abad ke-16 hingga ke-17 M yang ditandai dengan kode **K1, K2, K3, K4, K5, K6 dan K7**. K1 berlokasi di area pusat dengan bentuk yang kompleks, merupakan Pusat Istana Kesultanan Bima. K2 merupakan Masjid Kesultanan Bima. K3 Terletak tidak jauh dari K2 dan berada di area pemukiman Bangsawan. K4 merupakan Langgar Melayu. K5 yaitu Pelabuhan Bima. Benteng Asakota I (**K6**) dan Benteng Asakota II (**K7**) sebagai sarana pertahanan strategis yang berada di sisi utara dan selatan Teluk Bima. Keseluruhan komponen tersebut menjadi data utama yang dianalisis untuk menjawab permasalahan terkait Bima sebagai kota maritim pada abad ke-16 hingga ke-17 M.

**Bab V** berisi pembahasan terkait komponen-komponen Kota tua Bima dengan fokus mengidentifikasi teknologi dan fungsi bangunan dalam konteks perkotaan. Selanjutnya, identifikasi karakteristik Bima sebagai kota maritim dengan menganalisis jarak antar komponen-komponen Kota Bima dengan Pelabuhan Bima serta analisis perbandingan dengan kota maritim pada periode yang sama seperti Banten. Perkembangan Bima sebagai Kota maritim didukung dengan kondisi lanskap Teluk Bima berupa bentuk dan topografi yang ideal sebagai Pelabuhan, kedalaman laut dan kondisi arus gelombang yang aman untuk aktivitas pelayaran dan perdagangan di Kota Bima. Peran Bima dalam kemaritiman Nusantara Abad ke- 16 - 17 M, didukung letak geografis Bima dalam Jalur Pelayaran dan perdagangan Nusantara Abad ke- 16 - 17 M, sebagai wilayah transit yang menghubungkan jalur Malaka-Jawa-sulawesi dan Maluku. Selain sebagai pelabuhan transit, Bima pada Abad ke- 16 - 17 M menawarkan komoditi berharga seperti kuda, kayu sapan, dan budak.

**Bab VI** berisi tentang kesimpulan dari materi yang telah ditampilkan pada penelitian ini dan dilanjutkan dengan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dipakai sebagai petunjuk, pembanding, serta penunjang dalam penelitian ini. Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka tersebut, dapat dicari data, konsep, dan teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Buku Anthony Reid (2011), "*Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680*" membahas periode abad ke-15 hingga ke-17, Asia Tenggara mengalami pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang pesat. Perdagangan rempah-rempah, tekstil dan barang lainnya meningkatkan interaksi antara kota-kota pelabuhan di Asia Tenggara dengan negara-negara lain di Asia, Eropa dan Timur Tengah. Reid ingin mengkaji bagaimana proses ini mempengaruhi struktur sosial, politik dan budaya di Asia Tenggara. Reid menggunakan metode penelitian sejarah dengan menganalisis sumber-sumber primer seperti catatan sejarah, dokumen perdagangan dan laporan perjalanan. Ia juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan perkembangan kota-kota pelabuhan di Asia Tenggara. Pendekatan teoritis yang digunakan adalah Teori Sistem Dunia dan Teori Kemaritiman. Reid juga menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan ilmu sejarah, ekonomi, politik dan budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan dan kemaritiman memainkan peran penting dalam mengembangkan struktur sosial, politik dan budaya di Asia Tenggara. Kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Surabaya dan Banten menjadi pusat perdagangan internasional. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan juga mempengaruhi munculnya kelas pedagang dan perubahan struktur sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Asia Tenggara pada abad ke-15 hingga ke-17 merupakan kawasan yang sangat dinamis dengan perdagangan dan kemaritiman yang pesat. Perdagangan dan kemaritiman mempengaruhi struktur sosial, politik dan budaya di kawasan ini. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya perdagangan dan kemaritiman dalam mengembangkan kawasan.

Tulisan M.A.P. Meilink-Roelofs (2016) "*Persaingan Eropa & Asia Di Nusantara: Sejarah Perniagaan 1500-1630*". Pada bagian latar belakang membahas pada abad ke-16, Indonesia menjadi pusat perdagangan Asia dengan rempah-rempah, tekstil dan barang lainnya. Kedatangan bangsa Eropa, terutama Portugis, Spanyol dan Belanda, mempengaruhi dinamika perdagangan di kawasan ini. Meilink-Roelofs ingin mengkaji bagaimana pengaruh Eropa mempengaruhi perdagangan dan masyarakat Indonesia. Meilink-Roelofs menggunakan metode penelitian sejarah dengan menganalisis sumber-sumber primer seperti: 1. Catatan sejarah Portugis, Spanyol dan Belanda 2. Dokumen perdagangan dan kontrak 3. Laporan perjalanan pelaut dan pedagang. Metode

komparatif digunakan untuk membandingkan perkembangan perdagangan sebelum dan sesudah kedatangan Eropa. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedatangan Eropa mempengaruhi perdagangan Indonesia secara signifikan. Perdagangan rempah-rempah menjadi monopolisasi Eropa, mengubah struktur sosial dan politik Indonesia. Munculnya kelas pedagang dan perubahan struktur sosial juga terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh Eropa terhadap perdagangan dan masyarakat Indonesia antara tahun 1500-1630 sangat signifikan. Perdagangan rempah-rempah menjadi pusat perhatian Eropa, mempengaruhi struktur sosial, politik dan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang sejarah perdagangan Indonesia dan pengaruh kolonialisme.

Karya lainnya adalah buku yang di tulis oleh A.B. Lopian (2017) *"Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17"* yang ditulis oleh Adrian B. Lopian memberikan wawasan mendalam mengenai sejarah pelayaran dan perdagangan di Nusantara setelah era kerajaan Hindu, terutama pada masa transisi ke pemerintahan Islam. Buku ini berfokus pada periode antara tahun 1500 hingga 1700, di mana kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh, Banten, dan Malaka mulai berkembang dan memainkan peran penting dalam jalur perdagangan internasional. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk menggambarkan peran penting yang dimainkan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dalam dunia perdagangan maritim global. Pada abad ke-16 dan ke-17, Nusantara menjadi titik pertemuan utama bagi pedagang dari Eropa, Asia, dan Timur Tengah, dengan rempah-rempah sebagai komoditas utama yang diperdagangkan. Lopian menggunakan pendekatan sejarah sosial dan ekonomi dalam menganalisis perkembangan pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Ia menelusuri sumber-sumber sejarah, seperti catatan pelaut Eropa, kronik kerajaan-kerajaan Islam, serta dokumen-dokumen perdagangan yang menggambarkan hubungan antara Nusantara dan dunia luar. Penelitian ini juga memanfaatkan analisis tekstual dan arkeologis untuk menggambarkan jaringan pelayaran dan perdagangan maritim yang kompleks pada masa tersebut. Lopian banyak mengacu pada teori sejarah ekonomi dan perdagangan, dengan menekankan bagaimana kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara mengatur dan mengendalikan jalur perdagangan internasional. Ia juga membahas teori mengenai sistem ekonomi global yang mulai terbentuk pada abad ke-16 dan 17, di mana Nusantara menjadi bagian integral dari jaringan perdagangan antara Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Buku ini menunjukkan bahwa pada abad ke-16 dan 17, Nusantara tidak hanya berperan sebagai jalur perdagangan penting tetapi juga sebagai pusat distribusi barang-barang mewah, terutama rempah-rempah, yang sangat dibutuhkan oleh pasar Eropa. Kerajaan-kerajaan Islam di wilayah ini, seperti Aceh dan Banten, memainkan peran strategis dalam menjaga kontrol atas jalur-jalur pelayaran utama dan membentuk aliansi perdagangan dengan pedagang dari berbagai belahan dunia. Lopian

menyimpulkan bahwa pada periode 1500 hingga 1700, pelayaran dan perdagangan di Nusantara berkembang pesat berkat pengaruh kerajaan-kerajaan Islam yang memanfaatkan posisi geografis mereka untuk mengendalikan jalur perdagangan maritim. Buku ini menyoroti bagaimana perdagangan rempah-rempah tidak hanya mengubah ekonomi di wilayah ini, tetapi juga membawa dampak besar terhadap perkembangan budaya dan politik, baik di Nusantara maupun di luar kawasan ini.

Tulisan Sri Margana (2018), *Kerajaan-kerajaan Maritim di Nusantara* dalam tulisan ini menjelaskan bahwa Nusantara telah menjadi pusat perdagangan maritim sejak abad ke-1 Masehi. Kerajaan-kerajaan maritim seperti Srivijaya, Majapahit dan Banten memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Buku ini bertujuan mengkaji perkembangan kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara dan kontribusinya terhadap sejarah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis sumber-sumber sejarah (dokumen, catatan, dan laporan), studi komparatif dengan penelitian serupa, analisis laboratorium (penanggalan radiokarbon, analisis keramik, dll). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kerajaan Srivijaya (abad ke-7-14) merupakan kerajaan maritim pertama di Nusantara. Majapahit (abad ke-13-15) mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Banten (abad ke-16-17) menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Perkembangan kerajaan-kerajaan maritim dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perdagangan, teknologi dan lingkungan.

Buku berjudul "*Bandar Bima*" yang disusun Siti Maryam R. Salahuddin tahun (1993) Di dalam buku ini Salahuddin mentraliterasi dan membahas beberapa naskah di antaranya mengenai hukum/peraturan syahbandar di pelabuhan disebut 'Hukum Undang - Undang Bandar Bima' pelayaran perahu-perahu dan kapal-kapal, serta perjanjian pertama dengan pihak Belanda (VOC). Selain transliterasi dan pembahasan naskah-naskah tersebut, Salahuddin juga menjelaskan sejarah dan perkembangan Bima dalam aspek pemerintahan, kependudukan, sosial ekonomi, dan perdagangan. Salahuddin menyebutkan berbagai komoditas yang disebutkan dalam naskah termasuk komoditas yang dimonopoli Hindia Belanda maupun komoditas yang diekspor dan diimpor. Secara umum Salahuddin menjelaskan komoditas, pedagang, maupun sistem perdagangan dalam kurun waktu abad XVII-XX M. Buku ini tidak hanya membahas mengenai pelayaran tapi juga membahas mengenai perdagangan Bima di masa lampau secara umum. Buku ini memfokuskan pembahasan naskah-naskah tetapi informasi dalam buku ini sangat relevan sehingga dapat menjadi referensi yang membantu dalam penelitian ini khususnya mengenai pelayaran dan perdagangan Bima di masa lampau.

Tulisan karya Sumiyati (2018) dengan judul "Eksistensi Bima dalam Pelayaran dan Perdagangan Antar Pulau". Tulisan ini memaparkan sejarah

Kerajaan Bima dalam pelayaran dan perdagangan antar pulau di sekitarnya pada abad ke-16 hingga ke-19. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya Kerajaan Bima sebagai pusat pelayaran dan perdagangan di wilayah timur Indonesia. Sumiyati berusaha memahami bagaimana Kerajaan Bima berkembang menjadi pusat pelayaran dan perdagangan dan bagaimana kegiatan ini mempengaruhi masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan analisis sumber-sumber primer seperti dokumen-dokumen resmi, catatan-catatan sejarah dan laporan-laporan resmi dari arsip-arsip Belanda dan Indonesia. Penulis juga melakukan penelitian lapangan di Bima untuk mengumpulkan data dan informasi dari masyarakat lokal dan ahli sejarah. Pendekatan interdisipliner digunakan dengan memadukan sejarah, ekonomi dan antropologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerajaan Bima menjadi pusat pelayaran dan perdagangan yang penting pada abad ke-16 hingga ke-19. Kerajaan ini memiliki jaringan perdagangan yang luas meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Maluku. Perdagangan ini meliputi rempah-rempah, kayu, tekstil dan hasil bumi lainnya. Eksistensi Kerajaan Bima dalam pelayaran dan perdagangan antar pulau membawa dampak positif bagi masyarakat lokal, seperti meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan ekonomi. Namun, kegiatan ini juga membawa dampak negatif, seperti perubahan sosial dan ekologi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Kerajaan Bima memainkan peran penting dalam pelayaran dan perdagangan antar pulau di Nusa Tenggara Barat. Eksistensi Kerajaan Bima membuktikan kemampuan masyarakat lokal dalam mengembangkan pelayaran dan perdagangan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya memahami sejarah pelayaran dan perdagangan untuk memahami dinamika ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

Tulisan Suci Yati, dkk. (2020) berjudul "Pelabuhan Bima dalam Perdagangan Maritim Abad ke XVII". Tulisan ini memaparkan sejarah Pelabuhan Bima sebagai pusat perdagangan maritim di Nusa Tenggara Barat pada abad ke-17. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya Pelabuhan Bima dalam jaringan perdagangan maritim Nusantara dan peranannya dalam menghubungkan Indonesia dengan Asia Tenggara dan Eropa. Penulis ingin memahami bagaimana Pelabuhan Bima berkembang menjadi pusat perdagangan maritim dan bagaimana kegiatan perdagangan tersebut mempengaruhi masyarakat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan analisis sumber-sumber primer seperti dokumen-dokumen resmi, catatan-catatan sejarah, dan laporan-laporan resmi dari arsip-arsip Belanda dan Indonesia. Penulis juga melakukan penelitian lapangan di Bima untuk mengumpulkan data dan informasi dari masyarakat lokal dan ahli sejarah. Pendekatan interdisipliner digunakan dengan memadukan sejarah, ekonomi, dan antropologi untuk memahami kompleksitas perdagangan maritim di Pelabuhan Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelabuhan Bima

menjadi pusat perdagangan maritim yang penting pada abad ke-17 karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Pelabuhan ini dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai negara, termasuk Belanda, Portugis, dan Cina. Kegiatan perdagangan di Pelabuhan Bima meliputi perdagangan rempah-rempah, kayu cendana, kayu sapan, tekstil, dan hasil bumi lainnya. Perdagangan ini mempengaruhi masyarakat lokal dengan meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan ekonomi. Hasil penelitian ini memberikan wawasan baru tentang peran Pelabuhan Bima dalam perdagangan maritim Nusantara pada abad ke-17. Penelitian ini juga menekankan pentingnya memahami sejarah perdagangan maritim untuk memahami dinamika ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

Tulisan Muhammad Saleh Madjid yang berjudul tulisan Muhammad Saleh Madjid tentang "Ekspansi Politik Kerajaan Gowa-Tallo Terhadap Kerajaan Bima Abad XVII". Latar belakang tulisan ini adalah ekspansi politik Kerajaan Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan terhadap Kerajaan Bima di Nusa Tenggara Barat pada abad XVII. Penulis ingin memahami dinamika politik dan kekuasaan di wilayah timur Indonesia selama masa itu. Kerajaan Gowa-Tallo dan Kerajaan Bima merupakan dua kerajaan maritim yang kuat dan berpengaruh di Nusantara. Ekspansi politik Kerajaan Gowa-Tallo terhadap Kerajaan Bima menarik untuk diteliti karena mencerminkan dinamika kekuasaan dan politik di wilayah timur Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan analisis sumber-sumber primer seperti dokumen-dokumen resmi kerajaan, catatan-catatan sejarah, dan laporan-laporan resmi. Penulis juga menggunakan metode penelitian lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi dari masyarakat lokal dan ahli sejarah. Pendekatan interdisipliner digunakan dengan memadukan sejarah, politik, dan antropologi untuk memahami kompleksitas ekspansi politik Kerajaan Gowa-Tallo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi politik Kerajaan Gowa-Tallo terhadap Kerajaan Bima dimulai pada awal abad XVII, ketika Kerajaan Gowa-Tallo dipimpin oleh Sultan Alauddin. Ekspansi ini dilakukan melalui perang, diplomasi, dan pernikahan. Kerajaan Gowa-Tallo berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya di wilayah Nusa Tenggara. Ekspansi ini juga didorong oleh keinginan Kerajaan Gowa-Tallo untuk memperluas pengaruhnya di wilayah timur Indonesia. Kerajaan Bima, di sisi lain, berusaha mempertahankan kemerdekaannya dan kedaulatannya. Perlawanan Kerajaan Bima terhadap ekspansi Kerajaan Gowa-Tallo mencerminkan perjuangan masyarakat Bima untuk mempertahankan identitas dan kebudayaannya. Hasil penelitian ini memberikan wawasan baru tentang dinamika politik dan kekuasaan di wilayah timur Indonesia pada abad XVII. Ekspansi politik Kerajaan Gowa-Tallo terhadap Kerajaan Bima menunjukkan kompleksitas hubungan antar-kerajaan di Nusantara dan perjuangan masyarakat lokal untuk mempertahankan kemerdekaannya.

Tulisan Arifrahman yang berjudul "Migrasi Suku Bugis ke Bima pada tahun 1950", gelombang migrasi keluar Sulawesi Selatan sudah berlangsung sejak abad XV yang tidak hanya sekitar nusantara melainkan juga mereka yang melakukan perjalanan perpindahan mereka ke negeri seberang. Tentu saja karena yang diuraikan adalah situasi abad-abad lampau urainya mencoba mengungkapkan fakta-fakta sejarah dari para migrasi orang Bugis itu, yang menarik dari pengungkapan itu ialah bahwa ada beberapa faktor, baik berkaitan dengan situasi politik dalam memberi pada waktu bermigrasi maupun yang berkaitan dengan filsafat hidup yang mendorong mereka meninggalkan negeri asal tempat kelahirannya (Najering & Ridha, 2018). Perang VOC Makassar menyebabkan terjadinya migrasi besar-besaran penduduk Sulawesi Selatan, terutama yang negerinya bersekutu dengan Makassar seperti Luwu, Wajo, dan berpencar ke Sumbawa, Kalimantan, Bali, Jawa, Sumatra dan Johor. Gelombang migrasi keluar Sulawesi Selatan sudah berlangsung sejak abad ke-15 M, yang selain faktor perang VOC Makassar, juga karena faktor Siri' serta hal-hal yang prinsipil menyangkut hak-hak kebebasan dan atau kemerdekaan. (Kusuma, 2004).

Buku yang berjudul "Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915" merupakan karya sejarah yang mendalam tentang dinamika perdagangan dan politik di Nusa Tenggara selama masa kolonial Belanda. Penulis, I Gde Parimartha, berusaha memahami bagaimana perdagangan dan politik di Nusa Tenggara berubah selama periode 1815-1915. Periode ini dipilih karena merupakan masa transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern yang dikontrol oleh kolonial Belanda. Dalam penelitiannya, Parimartha menggunakan metode sejarah dengan analisis sumber-sumber primer seperti dokumen-dokumen resmi kolonial Belanda, catatan-catatan perdagangan, dan laporan-laporan resmi. Penulis juga melakukan penelitian lapangan di Nusa Tenggara untuk mengumpulkan data dan informasi dari masyarakat lokal. Pendekatan interdisipliner digunakan dengan memadukan sejarah, ekonomi, dan politik untuk memahami kompleksitas perdagangan dan politik di Nusa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan di Nusa Tenggara selama masa kolonial Belanda sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi kolonial. Kolonialisme Belanda memiliki dampak signifikan terhadap sistem ekonomi tradisional Nusa Tenggara, termasuk perubahan struktur ekonomi, perubahan pola perdagangan, dan perubahan sosial. Peran politik lokal dan kolonial sangat penting dalam mengatur perdagangan, termasuk pengaturan monopoli perdagangan, pengawasan pelabuhan, dan pengaturan pajak. Buku ini juga menyoroti perjuangan masyarakat Nusa Tenggara melawan kolonialisme Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan. Perlawanan ini terwujud dalam bentuk perlawanan bersenjata, perlawanan ekonomi, dan perlawanan budaya. Penulis menekankan pentingnya memahami sejarah perdagangan dan politik di Nusa Tenggara untuk memahami dinamika

sejarah Indonesia. Simpulan buku ini adalah bahwa perdagangan dan politik di Nusa Tenggara selama masa kolonial Belanda merupakan bagian dari sejarah kolonialisme di Indonesia. Buku ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana kolonialisme Belanda mempengaruhi sistem ekonomi dan politik di Nusa Tenggara, serta bagaimana masyarakat lokal berjuang melawan kolonialisme. Dengan demikian, buku ini menjadi sumber referensi yang penting bagi para sejarawan, peneliti, dan masyarakat yang ingin memahami sejarah Nusa Tenggara dan Indonesia.

Buku "Sejarah Bima Dana Mbojo" yang ditulis Soleh H. Abdullah Tajib merupakan karya sejarah yang mendalam tentang Kerajaan Bima di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kerajaan Bima merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara pada abad ke-17 hingga ke-19. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam perkembangan agama Islam dan perdagangan di wilayah timur Indonesia. Namun, sejarah Kerajaan Bima belum banyak diteliti dan didokumentasikan secara sistematis. Oleh karena itu, H. Abdullah Tajib, B.A. menulis buku ini untuk memenuhi kebutuhan akan pengetahuan sejarah Kerajaan Bima dan memperkaya khazanah sejarah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber sejarah seperti dokumen-dokumen resmi kerajaan, catatan-catatan sejarah dari penjelajah Barat, tradisi lisan masyarakat Bima, dan hasil penelitian arkeologi. Penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat Bima dan ahli sejarah untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Dengan demikian, penulis dapat merekonstruksi sejarah Kerajaan Bima secara komprehensif dan sistematis. Hasil penelitian tentang asal-usul Kerajaan Bima dan perkembangannya, sistem pemerintahan dan struktur sosial Kerajaan Bima, peran Kerajaan Bima dalam perkembangan agama Islam di Nusantara, perdagangan dan hubungan internasional Kerajaan Bima, perjuangan Kerajaan Bima melawan kolonialisme Belanda, dan pengaruh Kerajaan Bima terhadap kebudayaan dan identitas masyarakat Bima. Penulis juga menyoroti peran penting Kerajaan Bima dalam sejarah Indonesia, terutama dalam perkembangan agama Islam dan perdagangan di wilayah timur Indonesia.

Tulisan yang berjudul "Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara" yang ditulis oleh M. Hilir Ismail. Pada awalnya, Kesultanan Bima merupakan kerajaan kecil yang berkuasa atas wilayah Sumbawa. Namun, setelah masuknya agama Islam pada abad ke-16, Kesultanan Bima berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat dan berpengaruh. Sultan-sultan Bima seperti Sultan Abdul Kahir (1618-1640) dan Sultan Abdul Hamid (1640-1650) memperluas wilayah kekuasaan dan memperkuat perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Peran Kesultanan Bima dalam perjalanan sejarah Nusantara sangat signifikan. Pertama, Kesultanan Bima menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Indonesia dengan Asia

Tenggara, India dan Eropa. Perdagangan rempah-rempah, kayu dan tekstil menjadi tulang punggung ekonomi Kesultanan Bima. Kedua, Kesultanan Bima memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Sultan-sultan Bima menjadi pelindung dan penyebar agama Islam, sehingga memperkuat pengaruh Islam di wilayah timur Indonesia. Selain itu, Kesultanan Bima juga memainkan peran dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Pada abad ke-17, Kesultanan Bima menjadi salah satu kerajaan yang berani melawan kolonialisme Belanda. Perjuangan ini dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid dan Sultan Abdul Kahir, yang berusaha mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Kesultanan Bima. Dalam bidang kebudayaan, Kesultanan Bima juga memiliki pengaruh signifikan. Kebudayaan Bima yang kaya dan unik menjadi perpaduan antara tradisi lokal dan pengaruh Islam. Bahasa, kesenian dan adat istiadat Bima menjadi bagian dari kebudayaan Nusantara yang beragam. Dalam keseluruhan, peran Kesultanan Bima dalam perjalanan sejarah Nusantara sangat penting. Kesultanan Bima menjadi contoh kerajaan maritim yang kuat, berpengaruh dan berperan dalam perdagangan, politik dan kebudayaan. Sejarah Kesultanan Bima menjadi bagian dari sejarah Nusantara yang kaya dan beragam.

Buku Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amana Gappa juga menjadi salah satu referensi dalam penulisan ini, penulis penganggap penting untuk membaca dan menjadikanya sebagai referensi dalam penulisan ini karena karya ini merupakan peraturan dalam pelayaran dan perdagangan yang dipegang oleh BO' merupakan catatan Kerajaan Bima yang telah dibukukan setelah di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Sitti Maryam R. Salahuddin dan Henri Chambert-Loir. Momentum besar sejarah pelayaran dan perdagangan masyarakat Sulawesi Selatan diukir melalui hukum laut yang disusun pada 1 april 1676 oleh para Matoa (ketua) di Ujung Pandang bersama Matoa-Matoa dari Sumbawa, dan Paser. Inisiatornya adalah Amanna Gappa, sebelum dia menjabat Matoa Wajo tahun 1697-1723 (Noorduyn 2009:133,153). Hukum laut ini secara eksplisit menggambarkan wilayah pelayaran dan perdagangan masyarakat Sulawesi Selatan, meliputi negeri-negeri di Nusantara, Semenanjung Malaka (Kedah, Johor, dan Selangor), dan Kamboja. (Hamid, 2015). Para pelayar dan pedagang Bugis-Makassar di masa lalu dan ini semakin menjadi penting karena para pelayar dan pelaut Sulawesi Selatan secara umum berlayar dan berdagang di Bima dan sekitarnya.

Penelitian gabungan lintas disiplin ilmu dilakukan untuk pertama kalinya oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Museum Geologi Bandung, Balai Arkeologi Denpasar, dan Dinas Pertambangan Mataram pada (2016). Pengungkapan sisa-sisa kehidupan Kerajaan Tambora pada tahun berikutnya secara berkelanjutan tetap dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional sehingga berhasil menemukan bekas atap bangunan, alat tenun, anyaman bambu, tali tambang, pemecah pinang, tikar, lampit, hasil bumi

berupa padi, kemiri, kopi, dan artefak lainnya seperti buli-buli serta keramik (Geria 2010; Haribuana 2013). Pencarian sisa-sisa pusat Kerajaan Tambora, Pekat, dan Sanggar masih terus dilakukan, analisis pendahuluan terkait keberadaan temuan-temuan tersebut diduga sebagai barang komoditi perdagangan di Pulau Sumbawa.

Penelitian desk study pada tahun (2020) yang difokuskan pada berbagai referensi terkait kawasan Tambora, Pekat, sanggar memperoleh gambaran tentang sebaran bukti-bukti terkait aktivitas kemaritiman di kawasan Bima, Tambora dan sekitarnya. Kawasan perairan Teluk Saleh dan Teluk Sanggar, memiliki makna penting pada masa lampau, pelabuhan di sekitar Papekat dan Pelabuhan Kore merupakan pintu masuk untuk aktivitas perdagangan antarpulau saat itu oleh Kerajaan Dompnu, Tambora, dan Pekat. Temuan seperti, manik-manik tanah liat, bandul kalung dari binatang landak laut, cangkang kerang yang dilubangi, benteng-benteng tradisional, dan kompleks bangunan kolonial, merupakan bukti kuat bahwa sebelum dan sesudah letusan Gunung Tambora 1815, terdapat aktivitas permukiman dan kemaritiman melalui perdagangan antarpulau. Pulau Sumbawa merupakan salah satu mata rantai jalur perdagangan Nusantara (Haribuana, Sumerata, dan Indria 2020).

Kajian arkeologi terkait aktivitas pelayaran dan perdagangan ini mencakup sekitar tepi Teluk Bima. Selama ini kajian arkeologi yang umum dilakukan adalah inventarisasi situs-situs dan kajian terhadap situs-situs tertentu. Kegiatan inventarisasi situs-situs di Bima telah dilakukan beberapa kali di antaranya adalah (1) kegiatan inventarisasi dalam Laporan Hasil Survei di Daerah Nusa Tenggara Barat dalam Berita Penelitian Arkeologi No.12 oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (1985), (2) kegiatan inventarisasi yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Bali dalam Laporan Hasil Inventaris Cagar Budaya di Kota dan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2011; dan (3) kegiatan inventarisasi warisan budaya di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014 mencakup Kecamatan Wawo, Kecamatan Monta, Kecamatan Bolo, Kecamatan Lambu, dan Kecamatan Sape. Namun sejauh ini belum ada kajian situs-situs arkeologi terkait pelayaran dan perdagangan Bima masa lalu terutama di Teluk Bima.

Dari berbagai studi diatas, kajian secara khusus mengenai letak Bima dalam Jalur pelayaran dan perdagangan Nusantara, komponen-komponen terkait karakteristik Bima sebagai kota maritim, dan lanskap yang mendukung Bima sebagai kota maritim dan pemerintahan dengan menggunakan berbagai pendekatan dalam kajian ilmu arkeologi belum dibahas, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelitian dalam upaya menggambarkan secara utuh Bima sebagai kota maritim Nusantara Abad 16-17 M. Dengan kajian ini, penting untuk mengisi kesenjangan dalam kajian sejarah maritim Nusantara dengan menyoroti kota pelabuhan kecil seperti Bima yang perannya sering kali terabaikan dalam narasi besar jalur rempah Nusantara.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Lanskap Budaya Maritim

Teori Lanskap Budaya Maritim yang dikemukakan oleh Christer Westerdahl pada akhir 1970-an menawarkan perspektif komprehensif dalam memahami interaksi antara manusia dan lingkungan maritim. Konsep ini menekankan bahwa budaya maritim tidak hanya terbatas pada aktivitas di laut, tetapi juga mencakup hubungan dengan daratan, termasuk infrastruktur pesisir, rute pelayaran, dan aspek budaya yang terkait dengan kehidupan maritim (Westerdahl, 1992: 6).

Westerdahl menekankan bahwa pemisahan antara "laut" dan "darat" berdasarkan topografi semata adalah kesalahan, karena keduanya merupakan bagian dari dunia kognitif yang sama, yaitu lanskap budaya. Sebagai contoh, lukisan gua yang menggambarkan perahu, meskipun terletak jauh di pedalaman, menunjukkan bahwa pengetahuan tentang laut menjadi bagian dari dunia kognitif pembuatnya. Pendekatan ini mengkritisi pandangan ideografis yang melihat situs atau artefak maritim hanya berdasarkan fungsi atau hubungannya dengan ekologi maritim. Sebaliknya, teori lanskap budaya maritim menekankan pentingnya memahami hubungan antara laut dan darat sebagai proses kognitif yang saling mempengaruhi (Westerdahl, 1992: 6).

Misalnya dalam konteks Sumatera, penelitian yang menggunakan pendekatan lanskap budaya maritim mencakup aspek-aspek seperti lingkungan maritim, pusat-pusat budaya maritim, rute pelayaran, warisan budaya maritim, toponimi, serta hubungan antara pesisir dan pedalaman. Sumatera, dengan posisi geografisnya yang strategis, memiliki sejarah dan kebudayaan maritim yang kompleks, berperan sebagai pintu gerbang dalam jaringan rute pelayaran dan perdagangan maritim. Penerapan teori ini di Indonesia masih dalam tahap awal, dengan fokus penelitian yang lebih banyak pada arkeologi penyelamatan dan dokumentasi cagar budaya. Eksplorasi teoritis yang mengaitkan interpretasi arkeologis dengan teori sosial kontemporer masih jarang dilakukan.

Westerdahl juga menyoroti pentingnya toponimi dalam memahami lanskap budaya maritim. Nama-nama tempat yang terkait dengan aktivitas maritim dapat memberikan wawasan tentang hubungan historis antara masyarakat dan lingkungan maritim mereka. Selain itu, hubungan antara pesisir dan pedalaman menjadi aspek penting dalam lanskap budaya maritim. Sungai-sungai besar di Sumatera, misalnya, berperan sebagai jalur penghubung yang memungkinkan interaksi antara komunitas pesisir dan pedalaman, memperkaya dinamika budaya maritim di wilayah tersebut (Westerdahl, 1992: 6)..

Pendekatan lanskap budaya maritim juga relevan dalam memahami jaringan perdagangan dan interaksi budaya lintas kawasan. Secara keseluruhan, teori lanskap budaya maritim yang dikemukakan oleh Westerdahl menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami interaksi antara manusia dan lingkungan maritim. Dengan mempertimbangkan aspek

kognitif, simbolis, dan material, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana budaya maritim terbentuk dan berkembang dalam konteks geografis dan historis tertentu.

### **2.2.2 Kota Pelabuhan dan Politik (*Port and Politics*)**

Konsep "*Port and Politics*" (Yuliati: 2013) merupakan sebuah konsep untuk memahami hubungan antara kota pelabuhan dan pemerintahan atau kekuasaan politik dalam konteks kemaritiman di Indonesia dan Asia Tenggara. Menurut Yuliati, kota pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai pusat politik dan budaya yang mempengaruhi perkembangan masyarakat maritim. Dalam konsep ini, Yuliati menekankan bahwa kota pelabuhan dan pemerintahan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Pemerintahan memainkan peran penting dalam mengatur kegiatan maritim, seperti perdagangan, perkapalan, dan keamanan laut. Sementara itu, kota pelabuhan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang menggerakkan perekonomian lokal dan regional.

Interaksi antara masyarakat pelabuhan dan pemerintah juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas masyarakat maritim. Masyarakat pelabuhan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang spesifik, seperti akses ke fasilitas pelabuhan, perlindungan hukum, dan kesempatan ekonomi. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan dan kepentingan tersebut untuk memastikan stabilitas dan kemakmuran masyarakat maritim. Dalam konteks Asia Tenggara, konsep "*Port and Polity*" dapat dilihat dalam contoh kesultanan-kesultanan maritim seperti Malaka, Makassar, dan Banten. Kesultanan-kesultanan ini memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dan efektif dalam mengatur kegiatan maritim, serta memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat pelabuhan.

Dalam perspektif kemaritiman, *Port and Politics* di Indonesia dan Asia Tenggara memiliki karakteristik unik. Kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Surabaya, Banten dan Aceh menjadi pusat perdagangan internasional, dengan jaringan yang luas ke Asia, Eropa dan Timur Tengah. Pemerintahan lokal dan kolonial memainkan peran penting dalam mengatur kegiatan ekonomi dan sosial. Pemukiman juga menjadi tempat penting bagi pertumbuhan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Pemusatan antara pelabuhan dan pemerintahan (*port and polity*) menjadi gejala umum dalam dunia maritim Asia Tenggara, meskipun lokasinya terpisah keduanya memiliki mata rantai yang saling berkaitan erat.

Pada abad ke- 16-17 M, ketika Nusantara mengalami kemajuan pesat dalam bidang perdagangan, maka dibarengi dengan perkembangan kota-kota pemerintahan kerajaan yang kosmopolitan. Hubungan antara pelabuhan dan pemerintahan dan kedudukannya yang strategis menjadikannya sebagai pintu gerbang utama dalam perkembangan ekonomi Kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Hal ini diperlihatkan oleh Banten misalnya, penguasa tertingginya memiliki akses di bidang perdagangan, sehingga dengan cepat dapat mengontrol politik dengan cara ikut serta dalam organisasi dan ekspansi perdagangan di pelabuhan besar Hubungan antara *Port dan Polity*, mengakibatkan suatu wilayah berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perniagaan dan budaya. Pada periode yang sama, ketika Kesultanan Bima muncul sebagai Pusat kekuasaan Islam di Nusa Tenggara, Kota pelabuhan dan pemerintahan Bima tumbuh menjadi kota yang dinamis dan kompleks.

## 2.3 Profil Wilayah Penelitian

### 2.3.1 Wilayah Adminstrasi

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terdiri dari delapan Kabupaten yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Bima dan dua Kota, Mataram dan Bima. Kabupaten Bima dan Kota Bima, yang merupakan bagian dari provinsi NTB, berada di ujung Timur provinsi NTB, Batas-batas wilayah Kabupaten Bima adalah sebagai berikut:

- Utara : Laut Flores
- Selatan : Samudera Indonesia
- Barat : Kabupaten Dompu
- Timur : Selat Sape



**Peta 1.** Peta Administrasi Kota Bima dan Kabupaten Bima dan wilayah - wilayah lain di Pulau Sumbawa  
( Sumber: Noorduyn dan dimodifikasi Lila jamilah, 2024)

Informasi yang terkait dengan profil wilayah yang terdapat pada pembahasan ini secara keseluruhan diperoleh dari portal online Kota dan Kabupaten Bima dan Data BPS tahun 2022 dan 2023. Kabupaten Bima dan Kota Bima merupakan daerah otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara geografis Kabupaten Bima terletak di ujung timur dari Pulau Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima (pemekaran dari Kabupaten Bima). Secara geografis Kabupaten Bima terletak pada posisi 117°40"-119°10" Bujur Timur dan 70°30" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bima setelah pembentukan Daerah Kota Bima berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2002 adalah seluas 437.465 Ha atau 4.394,38 Km<sup>2</sup> (sebelum pemekaran 459.690 Ha atau 4.596,90 Km<sup>2</sup>) dengan jumlah penduduk 419.302 jiwa dengan kepadatan rata-rata 96 jiwa/Km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Bima meliputi 18 kecamatan di antaranya adalah Ambalawi, Belo, Bolo, Donggo, Lambitu, Lambu, Langgudu, Madapangga, Monta, Palibelo, Parado, Sanggar, Sape, Soromandi, Tambora, Wawo, Wera, dan Woha. Lahan di Kabupaten didominasi oleh lahan tegal/kebun seluas 60.471 ha dan lahan sawahnya (irigasi dan non irigasi) seluas 42.962 ha (BPS Kab. Bima, 2023: 124).

Secara geografis Kota Bima terletak pada posisi 117°40"-119°10" Bujur Timur dan 70°30" Lintang Selatan. Kota Bima memiliki luas sebesar 22.225 ha meliputi 5 kecamatan yaitu Rasanae Timur, Rasanae Barat, Mpunda, Raba, dan Asakota. Lahan persawahan di Kota Bima menggunakan pengairan irigasi seluas 1.220,53 Ha, lahan tegal/kebun seluas 6.146,89 ha, Ladang/Huma 1.299 ha, hutan rakyat/tanaman kayu-kayu seluas 2.397 ha, hutan negara, tambak, kolam, empang seluas 8.265 ha (BPS Kota Bima, 2023: 239).

### **2.3.2 Keadaan Topografi**

Topografi wilayah Kabupaten Bima pada umumnya berbukit-bukit. Bima tergolong ke dalam morfologi perbukitan dan pegunungan. Satuan morfologi ini menyebar pada bagian tengah wilayah, membentang dari timur ke barat yang dicirikan oleh lahan berkelerengan lebih besar dari 40% dan ketinggian tempat lebih besar dari 500 mdpl. Satuan morfologi pegunungan dengan dua puncak yakni Gunung Tambora (2.851 mdpl) dan Gunung Soromandi (4.775 mdpl). Pada umumnya satuan morfologi ini kondisi lerengnya agak terjal dan di beberapa tempat terdapat jeram. Pada satuan morfologi perbukitan mempunyai lereng yang landai dengan sungai yang berkelok-kelok dan sebagian lahan pertanian, sedangkan satuan morfologi dataran dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Topografi Kota Bima didominasi oleh lahan dengan kemiringan datar dengan kelerengan 0-40 %, yaitu seluas 9.242 ha, kemudian lahan bergelombang seluas 4.994 ha, lahan dengan kemiringan curam seluas 4.534 ha, dan lahan dengan kondisi sangat curam dengan luas 2.957 ha. Pada umumnya semua kecamatan di Kota Bima didominasi oleh wilayah yang relatif

datar dan bergelombang. Namun, ada 2 (dua) wilayah yang masih memiliki kemiringan sangat curam yaitu Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Timur memiliki kelerengan lebih dari 40% mencapai 34-36 persen. Luas Kecamatan Raba dengan kemiringan diatas 40% mencapai 21 %. Sementara dua kecamatan lain (Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda) kemiringan diatas 40% hanya berkisar 1-6 persen.

### **2.3.3 Keadaan Iklim**

Kondisi Kota dan Kabupaten Bima adalah beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 103,40 mm dan hari hujan rata-rata 11 hari/bulan yang dihitung berdasarkan data 2 (dua) tahun terakhir. Puncak hari dan curah hujan terjadi sekitar Bulan Desember-Januari dengan temperatur berkisar 27,50 °C sampai dengan 33,10 °C. Matahari bersinar terik sepanjang musim dengan rata-rata intensitas penyinaran tertinggi pada Bulan Oktober.

Menurut Koppen, Kepulauan Sunda Kecil beriklim savana tropis (*tropical savanna climate*). Iklim savana tropis memiliki curah hujan tahunan kurang dari 150 sentimeter (1500 milimeter), dengan curah hujan paling kering terjadi pada bulan Maret, yang kurang dari 4 sentimeter (40 milimeter). Musim hujan terjadi pada bulan-bulan Desember-Januari sampai Maret-April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan-bulan Mei-Juni sampai Oktober-November.

Seluruh wilayah kawasan Bima tergolong sebagai daerah yang cenderung kering. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, sebagian besar wilayah ini mempunyai iklim yang disebut tropis musim. Tipe iklim tersebut dipengaruhi oleh angin muson (musim), yang setiap tahunnya bertiup secara tetap pada waktu-waktu tertentu dari arah tenggara dan barat laut. Keadaan angin di wilayah ini yang cukup tenang, terutama di sekitar Teluk Bima, membuat pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Pulau Sumbawa terutama Bima, sering dikunjungi kapal-kapal dari berbagai daerah.

Menurut Koppen, Kepulauan Sunda Kecil beriklim savana tropis (*tropical savanna climate*). Iklim savana tropis memiliki curah hujan tahunan kurang dari 150 sentimeter (1500 milimeter), dengan curah hujan paling kering terjadi pada bulan Maret, yang kurang dari 4 sentimeter (40 milimeter). Musim hujan terjadi pada bulan-bulan Desember-Januari sampai Maret-April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan-bulan Mei-Juni sampai Oktober-November.

### **2.3.4 Keadaan Sungai, Pesisir, Teluk Bima**

Di wilayah Kabupaten Bima banyak mengalir sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil dengan panjang aliran antara 5 sampai 95 km. Dari sungai-sungai yang ada tersebut sebagian besar yaitu 20 sungai sudah dimanfaatkan untuk irigasi. S. Campa S. Madapangga S. Kerengo S. Pandede S. Mbawa S. Kala S. Manggi S. Boroloka S. Kampasi S. Paradokanca S. Roka



Dalam penelitian ini akan membahas lebih rinci terkait perairan Teluk Bima yang berperan penting dalam perjalanan sejarah Kerajaan dan Kesultanan Bima sebagai akses pelayaran dan perdagangan. Saat ini kawasan Teluk Bima juga sering ditemukan kapal maupun perahu. Bahkan pengembangan pariwisata di kawasan Teluk Bima sedang ditingkatkan oleh pemerintah setempat. Hal ini menunjukkan peran Teluk Bima masih berperan penting bagi masyarakat berkaitan dengan aktivitas pelayaran dan perdagangan. Peran Teluk Bima dari masa lalu sampai saat ini masih sama sebagai sumber kehidupan masyarakat pesisir. Hal ini menunjukkan ciri adanya aktivitas maritim yang telah berlangsung dari dulu sampai saat ini. Oleh karena itu menarik untuk mengkaji kehidupan masyarakat pesisir Teluk Bima terutama yang berkaitan dengan aktivitas maritim dengan melihat indikasi hubungan kontekstual antara tinggalan arkeologi dengan kehidupan masyarakat di pesisir Teluk Bima.

## **2.4 Latar Belakang Sejarah Kerajaan – Kesultanan Bima**

### **2.4.1 Sejarah Kerajaan – Kesultanan Bima**

Sebelum terbentuknya Kerajaan dan Kesultanan Bima, Bima dulunya terbagi menjadi beberapa bagian daerah Bima yang dikepalai oleh seorang Ncuhi. Bagian utara Bima dikepalai Ncuhi Banggapupa, bagian selatan Bima dikepalai Ncuhi Parewa, bagian tengah dikepalai Ncuhi Dara, bagian timur dikepalai Ncuhi dikepalai Ncuhi Dorowani, dan bagian barat dikepalai Ncuhi Bolo. Kemudian atas kesepakatan bersama terbentuklah Kerajaan Bima dimana rajanya adalah seseorang dengan gelar sangaji yang ditunjuk oleh para Ncuhi.

Waktu pendirian Kerajaan Bima ada dua versi yaitu antara abad ke- 9-10 M dan abad ke-14 M. Namun tak banyak catatan asing maupun sumber penulisan lokal maupun daerah lain di Nusantara yang menyebutkan pendirian Kerajaan Bima. Namun hal yang dapat dipastikan adalah Bima telah berinteraksi dengan kebudayaan (Hindu-Buddha) dari luar berdasarkan bukti-bukti arkeologis seperti Situs Wadu Pa'a, Wadu Tunti, dan lainnya sejak abad ke- 9-10 M.

Meski tak banyak data terkait awal pendirian Kerajaan Bima, Ismail (2004: 37-46) menetapkan beberapa raja dan perdana menteri yang berperan besar dalam pengembangan Kerajaan Bima, yaitu: Timor, Sumba, dan Sawu. Pada masa pemerintahan Raja Tureli Nggampo La Mbila Ma Kapiri Solo ( $\pm$  Abad XV M) batas bagian baratnya menjadi Kerajaan Dompou.

Meski tak banyak data terkait awal pendirian Kerajaan Bima, Ismail (2004: 37-46) menetapkan beberapa raja dan perdana menteri yang berperan besar dalam pengembangan Kerajaan Bima, yaitu:

1. Raja Manggampo Jawa. Raja ini berperan dalam kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan (sastra). Beliau mendatangkan seorang ahli teknik pembuatan batu bata dari Majapahit bernama Ajar Panuli. Dari aspek sastra

pun berkembang dengan penulisan BO (catatan lama istana) dengan lontar dan tulisan Bima.

2. Raja Ma Wa'a Paju Longge. Raja ini mengirim kedua adiknya untuk menuntut ilmu ke Kerajaan Manurung di Sulawesi Selatan. Mereka adalah Manggampo Donggo dan Ma Wa'a Bilmana.
3. Raja Manggampo Donggo & Perdana Menteri Tureli Nggampo Ma Wa'a Bilmana (± Abad XV M). Raja ini mengatasi krisis khususnya dalam bidang ekonomi, keamanan, politik pemerintahan maupun ilmu pengetahuan. Mereka juga membentuk armada laut yang dikepalai *Rato Pabise* (Laksamana Laut), armada darat memiliki kavaleri (pasukan berkuda) dikepalai *Jena Jara* (pimpinan perwira), dan panglima laskar kerajaan dikepalai *Bumi Renda*.
4. Raja Ma Wa'a Ndapa Perdana Menteri Tureli Tureli La Mbila (Ruma Ta Ma Kapiri Solo) (Abad XVI M). Raja ini berhasil membawa perahu-perahu Bima mengarungi perairan Nusantara. Perdana menterinya berhasil menaklukkan Solor, Timor, Sumba dan Sawu.

Menurut Morris (1890) ada 49 raja dan sultan yang pernah memerintah di Bima. Maharaja Sang Bima ditempatkan pada urutan ke-11. Sedangkan dalam catatan Rouffaer yang kemudian diterbitkan oleh Noorduyn (1987), ada 26 raja atau sultan, mulai dari Maharaja Sang Bima sampai dengan Sultan Ibrahim. Masa Kerajaan Bima sendiri terbagi dengan periode masa kerajaan Hindu dan kerajaan Islam.

Peralihan kekuasaan dari Kerajaan Bima menjadi Kesultanan Bima di abad ke- 17 M berkaitan dengan penyebaran Islam di Bima. Hal ini dipengaruhi hubungan Bima dengan wilayah lain yang menjadi basis agama Islam dan kedatangan pedagang muslim di Bima melalui jalur pelayaran dan perdagangan Nusantara. Menurut Syamsuddin (1980) kedatangan Islam di Bima berhubungan dengan kejayaan Malaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara pada abad XV-XVI M (Haris, 2006: 19). Raja Bima memeluk Islam tersebut terjadi setelah Raja Gowa mengirim ekspedisi militernya pada tahun 1619. Sejak berdirinya Kesultanan Bima di bawah pemerintahan Sultan Abdul Kahir tahun 1620, Bima menjadi daerah di bawah kekuasaan Kerajaan Gowa. Menurut Haris (2006: 20) kedatangan Islam di Bima berhubungan dengan pedagang muslim dari Malaka, Jawa dan Sulawesi, yang menyebarkan Islam di Maluku melalui jalur pelayaran Nusantara.

Selama 331 tahun sejak 1620-1951, Bima diperintah oleh 14 orang sultan. *Pertama*, Sultan Abdul Kahir (1620-1640 M); *kedua*, Sultan Abil Khair Sirajuddin (1640-1682 M) *Ketiga*, Sultan Nuruddin Abubakar Ali Syah (1682-1687 M), *keempat*, Sultan Jamaluddin Ali Syah (1687- 1696 M), *Kelima*, Sultan Hasanuddin Muhammad Syah (1696-1731 M), *Keenam*, Sultan Alauddin Muhammad Syah (1731-1748 M), *Ketujuh*, Sultanah Kamalat Syah, (1748-1750) *Kedelapan*, Sultan Abdul Kadim Muhammad Syah Zilullah fil Alam (1751 - 1773

M), *Kesembilan*, Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah Zilullah fil Alam (1773-1817 M), *Kesepuluh*, Sultan Ismail Muhammad Syah (1817 -1854), *Kesebelas*, Sultan Abdullah (1854-1868 M) *Keduabelas*, Sultan Abdul Aziz (1868 - 1881 M), *Ketigabelas*, Sultan Ibrahim (1881-1915 M), *Keempatbelas* sekaligus sultan definitive terakhir adalah Sultan Muhammad Salahuddin (1915 -1951 M), setelahnya sultan yang diangkat adalah sultan pasca pembubaran swapraja di Bima, sultan ini adalah secara administrasi tidak lagi berkuasa dan memiliki perangkat pemerintahan selayaknya sultan-sultan sebelumnya. Kedudukan sultan dihidupkan lagi untuk fungsi pelestarian budaya semata. Kedua sultan yang diangkat tersebut adalah Sultan Abdul Kahir II (1999-2001) dan sultan Fery Zulkarnain, ST yang sekaligus menjabat sebagai Bupati Bima, setelah Sultan Fery mangkat, lembaga adat Bima belum menunjuk pewaris yang akan menggantungkan kedudukannya.

Berbagai peristiwa penting yang mewarnai dinamika perjalanan sejarah masa Kerajaan hingga Kesultanan Bima dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.** Peristiwa penting Masa Kerajaan hingga Kesultanan Bima Abad ke -14-17 M

Abad (M)	Peristiwa penting	Keterangan
XIV	Berdirinya Kerajaan Bima	Bima masih berbentuk Kerajaan Hindu-Budha.
XV	Perkembangan hubungan politik dan dagang dengan kerajaan Nusantara lainnya, dengan membentuk Pasukan Militer laut <i>Pabise</i> Kerajaan Bima	Bima mulai meluaskan wilayah kekuasaan dengan menguasai wilayah-wilayah di sekitar Nusa Tenggara seperti Manggarai, Reo, dan Pota.
XVI- Awal XVII	Islam di Bima mulai diperkenalkan oleh pedagang Jawa, Malaka, dan Makassar.	Kontak dengan pedagang muslim dan berbagai pergolakan politik Kerajaan Bima di tandai dengan Raja Bima La Kai memeluk Islam dan menjadi Sultan Abdul Kahir Sirajudin yakni sultan Bima pertama.
Akhir XVII	-Perjanjian Bongaya -Bima menjadi bagian dari jaringan perdagangan maritim	Kesultanan Gowa yang dikalahkan oleh VOC dan menandatangani perjanjian Bongaya dan berdampak pada perdagangan Bima. Bima menjadi bagian dari jaringan perdagangan maritim regional maupun internasional yang ikut berperan dalam perdagangan rempah dan komoditas lainnya.

(Sumber: Lila Jamilah, 2024)

Pada (**tabel 1**) diketahui pada awal abad ke-14, Bima dikenal sebagai kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Dalam masa ini, Bima menjadi salah satu pusat kekuasaan lokal yang memainkan peran penting dalam jaringan perdagangan regional di kawasan Nusa Tenggara. Selanjutnya, pada abad ke-15, hubungan dagang semakin berkembang dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara dan mancanegara, termasuk Jawa, Malaka, dan Tiongkok. Interaksi perdagangan ini membawa pengaruh budaya dan agama baru, khususnya Islam.

Pada awal abad ke-16, Islam mulai masuk ke Bima melalui jalur perdagangan maritim yang aktif. Pada tahun 1620-an, Raja La Kai memeluk Islam dan mengadopsi nama Sultan Abdul Kahir, menandai transisi Bima dari kerajaan bercorak Hindu-Buddha menjadi kesultanan Islam. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Bima, di mana sistem pemerintahan dan kebudayaan mulai berorientasi pada nilai-nilai Islam.

Di dalam catatan Portugis bahwa Kerajaan Gowa menyerang Kerajaan Bima pada tahun 1616, 1618, dan 1625 (Tayeb, 1982 dalam Madjid 2008:4; Tajib 1995:119). Penyerangan ini untuk menjadikan Bima sebagai pemasok produksi beras karena peningkatan permintaan beras. Beras-beras yang didatangkan dari Jawa (Tuban, Gresik, dan Jepara) sering terkendala musim dan cuaca ditambah jarak yang jauh. Maka dari itu Kerajaan Gowa berniat untuk menundukkan kerajaan-kerajaan di Pulau Sumbawa termasuk Kerajaan Bima yang wilayahnya dekat.

Menurut Ismail (2004) hubungan Bima dengan Gowa terjalin melalui kerjasama politik Kerajaan Gowa dengan penerus tahta Kerajaan Bima yang sah yaitu La Ka'i (Sultan Abdul Kahir). Kerajaan Bima berhasil beralih menjadi Kesultanan Bima setelah berhasil Raja Salisi berhasil ditaklukkan dengan bantuan dari Kerajaan Makassar. Pada tanggal 5 Juli 1640 Abdul Kahir dinobatkan menjadi Sultan Pertama dengan gelar *Ruma Ta Mbata Wadu* dan La Mbila menjadi *Ruma Bicara* (Raja Bicara/Perdana Menteri) sekaligus *Bumi Renda* (panglima perang) (Ismail 2004: 63-64).

Kedekatan Kesultanan Bima dan Kesultanan Gowa ditunjukkan dengan pernikahan Sultan Abdul Kahir yaitu Sultan Bima pertama dengan adik ipar Sultan Alauddin Karaeng Sikontu, ternyata hubungan perkawinan seperti ini tetap dilanjutkan oleh sultan-sultan sesudahnya. Hubungan Gowa dengan Bima yang awalnya hanya hubungan dagang dan perkawinan politik, akhirnya berhasil menjadikan Pulau Sumbawa termasuk Bima menjadi salah satu wilayah vassal kerajaan Gowa-Tallo pada tahun 1620. Sebagai vassal, setiap tahun Bima mengirim upeti ke Makassar berupa hasil bumi, kain kasar, kayu, dan kuda. Selain itu, Bima juga berkewajiban memasok Gowa dengan pasukan, baik untuk kepentingan menyerang maupun untuk mempertahankan diri (Noorduyn, 2007: 42).

Ketika Makassar mengalami kekalahan terhadap VOC dan melakukan Perjanjian Bongaya tidak hanya merugikan Makassar tapi juga berdampak dalam aspek politik dan ekonomi Kesultanan Bima. Belanda berhasil memonopoli perdagangan Makassar termasuk Bima. Meski begitu pada masa Pemerintahan Sultan Jamaludin (1687- 1696) dan Sultan Hasanuddin (1696-1731) membebaskan pelabuhan Bima terbuka untuk umum (Ismail, 2004: 101-107). Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, angkatan laut Bima bekerja sama dengan pelaut Makassar untuk menyerang kapal- kapal dagang Belanda yang berlayar di perairan Laut Flores dan sekitarnya.

Hubungan Bima dengan Makassar berjalan baik apalagi Makassar menjadi pusat perdagangan di Indonesia Timur bahkan dalam skala internasional. Abad XVII M merupakan masa Makassar jaya sebagai pusat perdagangan rempah- rempah dan beras (Madjid, 2008: 4). Kehadiran orang-orang Bugis di pelabuhan Bima meningkatkan aktivitas perdagangan di Bima. Pedagang Bugis dan Makassar mendominasi pola pelayaran dan perdagangan di Bima. Mereka memainkan peran utama dalam distribusi komoditas dan pengembangan jaringan perdagangan yang lebih luas, termasuk ke pulau Flores dan wilayah timur lainnya.

Hubungan Makassar dan Bima memberi banyak pengaruh besar dalam peralihan Kerajaan Bima menjadi Kesultanan Bima pada abad XVI-XVII M sehingga bukti kehadiran mereka banyak dari periode Kesultanan yang ditunjukkan dengan beragam budaya, artefak, dan situs hingga saat ini. Misalnya makam para sultan bergaya serupa dengan gaya makam para sultan dari Kerajaan Gowa. Pada akhir abad ke-17, Kesultanan Bima berkembang pesat sebagai bagian dari jaringan maritim Nusantara. Pelabuhan Bima menjadi salah satu simpul perdagangan strategis yang memperdagangkan komoditas seperti kuda, kayu sapan, budak, dan hasil laut.

#### **2.4.2 Wilayah Kekuasaan**

Wilayah Kerajaan Bima sebelum menjadi Kesultanan Bima Berdasarkan BO (catatan lama istana Bima). Awalnya Kerajaan Bima berbatasan dengan Laut Flores bagian utara, Laut Indonesia bagian selatan, Kerajaan Bolo bagian barat, dan Selat Sape bagian timur. Selanjutnya di bawah pemerintahan Raja Manggampo Donggo dan Tureli Nggampo Ma Wa'a Bilmana ( $\pm$  Abad XV M) mengekspansi bagian timur hingga Kepulauan Solor, Timor, Sumba, dan Sawu. Pada masa pemerintahan Raja Tureli Nggampo La Mbila Ma Kapiri Solo ( $\pm$  Abad XV M) batas bagian baratnya menjadi Kerajaan Dompu.

Kerajaan Bima di Pulau Sumbawa dibagi kedalam tiga wilayah yaitu: Belo, Bolo dan Sape, masing-masing diperintah oleh Galarang dan kepala kampung. Menurut sejarah batas Kerajaan Bima disebelah Timur termasuk sebelah barat Pulau Flores yang dikenal dengan nama Manggarai dan termasuk semua Pulau-Pulau yang ada di selat Sape. Itulah sebabnya dalam perjanjian

dengan kompeni atau pemerintah hindia Belanda dahulu dinyatakan bahwa batas Kerajaan Bima disebelah timur berbatasan dengan keresiden Timor yang terletak di Pulau Flores (Ismail 2004:32–33)..

Kesultanan Bima memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas sampai abad ke-19, wilayahnya melingkup bagian timur pulau Sumbawa, Flores Barat (Manggarai) dan pulau-pulau kecil di selat alas yang berjumlah sekitar 66 buah pulau. Namun dalam perkembangannya, wilayah Manggarai dan pulau-pulau kecil di sekitarnya kemudian lepas dari kekuasaan kesultanan Bima. Akhir Abad 19, wilayah Kesultanan Bima semakin menyempit, kontrak terakhir Kerajaan Bima dengan Gubernemen Hindia Belanda pada tahun 1888 semakin menyempit dan disebutkan bahwa wilayah Kerajaan Bima di sebelah utara dibatasi Laut Jawa, sebelah barat oleh Dompu, sebelah selatan oleh Lautan Hindia dan sebelah timur oleh Manggarai (Ismail 2004:34–35)..

### **2.4.3 Keadaan Penduduk**

Perkembangan masyarakat Bima merupakan sebuah dampak dari perkembangan perdagangan dan pelayaran yang berkembang dengan sangat pesat dan Bima merupakan salah satu daerah yang masuk pada zona pelayaran internasional dan tentu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Terutama yang hidup di wilayah pesisir dekat pelabuhan seperti percampuran antara Melayu dengan Bima yang hidup di pesisir timur Teluk Bima. Beberapa kelompok yang ada di Bima yang secara umum diklasifikasikan dalam dua pemukiman antara lain:

#### **1. Dou Donggo (Orang Donggo).**

*Dou Donggo* atau orang Donggo dipercayai sebagai kelompok masyarakat yang paling tua mendiami daerah Bima oleh karena itu mereka dianggap sebagai penduduk asli wilayah Bima. Dou Donggo atau Orang Donggo mendiami wilayah pegunungan yang sangat jauh dari wilayah pesisir. Berdasarkan dari tempat pemukimanya orang donggo terbagi dalam dua kelompok yaitu orang Donggo Timor (dalam bahasa daerah Donggo Ele) dan Donggo Seberang (dalam bahasa daerah Donggo Ipa). Orang Donggo Timur mendiami daerah dataran tinggi dibagian Bima tengah yang sekarang merupakan wilayah kecamatan Wawo Tengah dimana kesatuan hidup di dalamnya terdiri dari orang Kuta, Teta, Sambori, Tololawi, Kalodu, Kadi, dan Kaboro. Dalam banyak hal mereka sangat elastis dalam menerima pengaruh luar sebagai hasil pembauran dengan orang Bima. Sedangkan Donggo seberang, mereka mendiami daerah dataran tinggi di sebelah Barat Teluk Bima, yaitu wilayah kecamatan Donggo sekarang (Tajib 1995:157–58).

#### **2. Dou Mbojo (Orang Bima)**

*Dou Mbojo* atau orang Bima merupakan hasil pembauran dengan orang Makassar, Bugis, Melayu dan penduduk Donggo. Dan sebagai akibat

dari adanya hubungan dagang dan ikatan keluarga antara orang Bima dengan Bugis-Makassar pada umumnya. Sejak berdirinya Kesultanan Bima pada tahun 1620, orang-orang Sulawesi Selatan pada umumnya selalu berdatangan di Bima dengan berbagai tujuan dan kepentingan. Mereka terdiri dari golongan pedagang, politisi, agamawan, pelaut dan militer. Menurut catatan lama Kesultanan Bima (BO') mereka datan ke Bima dalam rangka ikut membantu mengembangkan politik dan agama di Bima. Dari sini kemudian banyak yang berkeluarga dengan penduduk setempat sehingga melahirkan percampuran yang dikenal sebagai orang Bima sekarang (Tajib 1995:157–58),.

### 3. Pendatang

Perkembangan masyarakat yang sangat beragam di wilayah Bima merupakan sebuah bukti bahwa Kesultanan Bima menjadi sebuah Kesultanan yang menjadi wilayah perniagaan yang cukup penting dalam arus lalu lintas perdagangan dan pelayaran maritim. Kemudian muncul komunitas-komunitas yang bermukim di wilayah Kesultanan Bima seperti komunitas Melayu yang mendiami kampung Melayu yang berada persis di wilayah pesisir dan dekat dengan pelabuhan, orang-orang Cina, orang-orang Arab, dan pedagang Bugis Makassar, dan masih banyak lagi komunitas yang hidup dan tinggal di wilayah Bima (Tajib 1995:157–58),.

#### 2.4.4 Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Bima merupakan masyarakat yang memiliki ciri hidup yang berbeda, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembagian kelompok masyarakat Bima berdasarkan letak geografisnya memberikan ciri tersendiri terhadap pola memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum masyarakat Bima yang tergabung dalam kelompok masyarakat Donggo hidup dengan bercocok tanam dan berburu, mengumpulkan hasil hutan serta berladang. Dan tentunya sangat berbeda dengan masyarakat Bima yang menghuni wilayah dataran rendah yang bertani, lebih-lebih wilayah pesisir yang tentunya mereka lebih berorientasi pada wilayah laut, menjadi nelayan atau bahkan menjadi pedagang antar pulau. Sejak abad ke-16 M ketika perkembangan perdagangan antar pulau semakin meluas dengan adanya perdagangan rempah-rempah dan beras menjadi mata rantai penghubung perdagangan rempah-rempah membuat raja Bima berpikir untuk melakukan pembangun terhadap sektor pertanian, mengingat letak geografis Bima yang berda pada jalur antara Jawa dan Maluku. Selain itu, mata pencaharian lain dari orang-orang Bima yang lain adalah berburu. Hutan tropis Bima menyimpan banyak babi liar, rusa dan kerbau liar. Sementara fauna yang terkenal dari Bima adalah kuda, kerbau, sapi, babi dan rusa.